

ABSTRAK

Penelitian Tesis ini berjudul Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Terhadap Pencemaran Laut Dihubungkan dengan Pasal 98 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan Studi Kasus di Wilayah Pesisir Pangandaran. Kabupaten Pangandaran sebagai Daerah Otonom Baru memiliki visi pariwisata yaitu menjadikan pantai Pangandaran sebagai destinasi wisata internasional. Untuk mewujudkan visi tersebut tentunya pantai Pangandaran wajib menampilkan pesona keindahan alam termasuk salah satunya kebersihan pantainya yang bebas dari limbah dan pencemaran. Terdapat kasus pencemaran di kawasan pesisir Pangandaran yang perlu diselesaikan berdasarkan hukum yang berlaku. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan, mengetahui, dan memahami bagaimana Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Terhadap Pencemaran Laut Dihubungkan Dengan Pasal 98 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dengan metode penelitian yuridis normatif melalui sumber data kepustakaan dan penelitian lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 merupakan *lex generalis* dengan sanksi yang tertuang di Pasal 98 namun dalam penegakan hukum pidana lingkungan terhadap pencemaran laut di wilayah Pesisir Pangandaran tidak berjalan secara efektif dikarenakan beberapa faktor: *Pertama*, Faktor Hukum yang masih tumpang tindih dan belum jelas sanksi yang diberikan kepada pelaku. *Kedua* Faktor Penegak hukum yang belum mengprioritaskan penegakan pidana kepada pelaku dengan kewenangan yang belum jelas. *Ketiga*, Faktor Fasilitas dan sarana belum memadai untuk membuktikan pencemaran laut. *Keempat* Faktor Masyarakat yang masih belum mendapatkan edukasi terkait penegakan hukum pidana lingkungan. *Kelima* Faktor Kebudayaan yang relatif masih menggunakan budaya kompromi dalam penindakan penegakan hukum pidana Pencemaran Laut di kawasan pesisir Pangandaran.

Kata Kunci : *Penegakan hukum, Hukum Pidana, Pencemaran Laut*

SUMMARY

*This thesis research is entitled Enforcement of Environmental Criminal Law Against Marine Pollution Linked to Article 98 of Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management with a Case Study in the Pangandaran Coastal Area. Pangandaran Regency as a New Autonomous Region has a tourism vision, namely making Pangandaran beach an international tourist destination. To realize this vision, Pangandaran Beach is of course obliged to display the charm of its natural beauty, including the cleanliness of its beaches which are free from waste and pollution. There are cases of pollution in the Pangandaran coastal area that need to be resolved based on applicable law. This research aims to describe, find out and understand how Environmental Criminal Law Enforcement Against Marine Pollution is Linked to Article 98 of Law Number 32 of 2009 using normative juridical research methods through library data sources and field research. The results of the research show that Law Number 32 of 2009 is a *lex generalis* sanction as stated in Article 98, however enforcement of environmental criminal law against marine pollution in the Pangandaran Coastal area does not work effectively due to several factors: First, legal factors that still overlap . and it is not clear what sanctions will be given to the perpetrators. The second factor is that law enforcement has not prioritized criminal enforcement against perpetrators with unclear authority. Third, the facilities and infrastructure factors are inadequate to prove marine pollution. Fourth Factor: The community still does not receive education regarding environmental criminal law enforcement. The five cultural factors are relatively still using a culture of compromise in enforcing the criminal law on marine pollution in the Pangandaran coastal area..*

Keywords: Law enforcement, Criminal Law, Marine Pollution